



MENJAGA AKUNTABILITAS DANA PENDIDIKAN DI ERA ARKAS: PERAN VITAL AUDIT INTERNAL DAN EKSTERNAL

Rinny Syahputri¹, Sonny M Ikhsan Mangkuwinata², Saiful Bahri³, Yuslaili⁴, Uchtiana⁵,
Zahraini⁶, Feri Irawan⁷

Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6,7}

e-mail: rinnysyahputry@gmail.com ¹, sonnymim@umuslim.ac.id ²,
saifulbahri@umuslim.ac.id ³, yuslaili630@gmail.com ⁴, Uchtianacut@gmail.com ⁵,
zahrainireni09@gmail.com ⁶, feridesky02@gmail.com ⁷

Diterima: 21/9/2026; Direvisi: 1/10/2026; Diterbitkan: 9/8/2026

ABSTRAK

Digitalisasi pengelolaan keuangan sekolah melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Kendati demikian, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2026 masih mengidentifikasi berulangnya residu penyimpangan anggaran di tingkat satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komplementer audit internal dan eksternal dalam ekosistem ARKAS, serta merumuskan proposisi kerangka konseptual guna menjembatani celah pengawasan yang teridentifikasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen (*document analysis*) terhadap laporan audit BPK, survei integritas KPK, serta artikel ilmiah terindeks periode 2016–2026 melalui analisis isi (*content analysis*). Hasil telaah dokumen menunjukkan kecenderungan bahwa kasus penyimpangan belanja sekolah mayoritas baru terdeteksi melalui audit eksternal pascatransaksi (*post-factum*) tanpa didahului deteksi dini oleh mekanisme pengawasan internal sekolah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ARKAS saat ini beroperasi optimal sebagai sistem pencatatan administratif (*recording system*), namun belum terintegrasi secara utuh sebagai sistem pengendalian preventif (*control system*). Sebagai kebaruan konseptual, penelitian ini merumuskan kerangka audit kolaboratif berbasis risiko digital (*digital risk-based collaborative audit framework*) yang memadukan verifikasi internal berlapis pada saat input data dengan penelusuran jejak digital independen oleh auditor eksternal. Kerangka teoretis ini diharapkan menjadi landasan konseptual bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat sinergi tata kelola pengawasan keuangan pendidikan berbasis teknologi informasi.

Kata Kunci: akuntabilitas, ARKAS, audit eksternal, audit internal, pembiayaan pendidikan.

ABSTRACT

The digitalization of school financial governance through the School Activity and Budget Plan Application (ARKAS) is designed to enhance the transparency and accountability of School Operational Assistance (BOSP) funds. Nevertheless, oversight reports from the Supreme Audit Board (BPK) and the Corruption Eradication Commission (KPK) during 2024–2026 continue to identify recurring budgetary deviations at the educational unit level. This study aims to examine the complementary roles of internal and external audits within the ARKAS ecosystem and to formulate a conceptual framework addressing the identified oversight gaps. Employing a qualitative approach with library research and document analysis designs, this study examined



BPK audit reports, KPK integrity surveys, and peer-reviewed articles from 2016–2026 using content analysis. The documentary findings indicate that school expenditure irregularities were predominantly identified through post-factum external audits without prior detection by school internal oversight mechanisms. This condition reflects that ARKAS currently operates effectively as an administrative recording system, but has not yet been fully utilized as an automated preventive control system. As a conceptual novelty, this study proposes a digital risk-based collaborative audit framework that integrates multi-tier internal verification during data entry with independent digital audit trail tracing by external auditors. This framework provides a theoretical baseline for policymakers to strengthen technological oversight synergies in educational finance.

Keywords: *accountability, ARKAS, education financing, external audit, internal audit.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola keuangan sekolah menandai fase baru pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. Pembiayaan pendidikan merupakan pilar fundamental dalam menunjang pemerataan dan peningkatan mutu layanan pembelajaran di sekolah (Mangkuwi et al., 2023). Namun demikian, pengelolaan dana pendidikan di tingkat satuan pendidikan kerap dihadapkan pada hambatan klasik berupa kerumitan administrasi, lemahnya transparansi pelaporan, serta keterbatasan akuntabilitas publik. Kehadiran sistem informasi seperti Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dihadirkan oleh pemerintah sebagai inovasi digital untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan belanja secara terpusat (Kolaboratif Sains, 2026). Digitalisasi ini diharapkan mampu meminimalisasi celah penyimpangan anggaran serta mewujudkan efisiensi pengelolaan keuangan sekolah secara transparan.

Pada tataran praktis, pemanfaatan ARKAS terbukti menyederhanakan rantai birokrasi pembukuan dan mempermudah sinkronisasi data keuangan antara sekolah dan kementerian terkait. Kajian Aliyah et al. (2025) melaporkan bahwa penerapan ARKAS secara teknis memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Otomatisasi pembukuan melalui sistem elektronik tersebut dirancang untuk mengunci mata anggaran agar realisasi belanja tidak melenceng dari perencanaan yang telah disahkan sebelumnya. Kendati demikian, efektivitas teknologi informasi tidak serta-merta menjamin hilangnya celah kecurangan manakala tidak dibarengi dengan pengawasan fungsional yang memadai (Mangkuwinata, 2026). Digitalisasi pencatatan anggaran tanpa mekanisme verifikasi yang ketat tetap berpotensi menyisakan celah penyalahgunaan wewenang.

Fakta empiris dari laporan lembaga pemeriksa independen memperlihatkan masih adanya anomali tata kelola keuangan sekolah di tengah masifnya penggunaan aplikasi ARKAS. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Survei Penilaian Integritas Pendidikan menemukan masih adanya indikasi penggunaan dana BOSP di luar petunjuk teknis serta pemotongan dana oleh oknum pengelola (KPK, 2024). Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2024–2026 turut mencatat serangkaian permasalahan di berbagai daerah: penggelembungan (*mark-up*) harga pengadaan pada empat belas sekolah negeri di Kota Medan (BPK RI, 2025a), belanja modal tanpa disertai bukti pertanggungjawaban sah di Bandar Lampung (BPK RI, 2025b), manipulasi berkas digital pada platform pengadaan di Provinsi Banten (BPK RI, 2025c), serta kerugian daerah akibat ketidaksesuaian spesifikasi belanja di Kabupaten Dompu (BPK RI, 2026). Temuan berulang ini menunjukkan bahwa digitalisasi



administratif belum sepenuhnya mampu memitigasi penyimpangan transaksi keuangan di lapangan.

Secara konseptual, akuntabilitas pengelolaan dana publik bertumpu pada tiga fondasi utama: regulasi yang jelas, keterbukaan informasi, serta fungsi audit yang independen dan efektif (Lailia, 2018). Kajian Yanti (2021) menggarisbawahi bahwa kepatuhan pelaporan keuangan sekolah sangat bergantung pada konsistensi pengawasan berjenjang di tingkat internal. Dalam kerangka pengendalian internal *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO), sistem berbasis teknologi informasi idealnya tidak hanya berperan sebagai alat pembukuan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali risiko yang mencegah transaksi non-prosedural (Kolaboratif Sains, 2026). Apabila komponen pengawasan internal berjalan pasif, sistem aplikasi hanya akan menjadi alat legalisasi administratif atas transaksi yang cacat secara material. Oleh sebab itu, fungsi pemeriksaan perlu ditransformasikan agar mampu mengimbangi kompleksitas modus penyimpangan di era digital.

Kajian terdahulu mengenai tata kelola keuangan sekolah berbasis ARKAS sebagian besar masih berfokus pada evaluasi efektivitas administratif dan kepuasan pengguna (Aliyah et al., 2025; Kolaboratif Sains, 2026). Sejauh literatur yang ditelaah, belum ditemukan kajian komprehensif yang menganalisis integrasi audit internal dan eksternal secara operasional di dalam arsitektur alur kerja digital ARKAS. Penelitian terdahulu cenderung memandang audit internal dan eksternal sebagai dua entitas yang terpisah dan bekerja secara periodik pascatransaksi (*post-factum*). Ketidadaan model pengawasan kolaboratif yang menautkan verifikasi berjenjang di sekolah dengan jejak digital sistem inilah yang menjadi celah akademik (*research gap*) utama dalam artikel ini.

Untuk menjawab kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan konseptual (*novelty*) berupa kerangka audit kolaboratif berbasis risiko digital (*digital risk-based collaborative audit framework*). Kerangka ini memosisikan audit internal sekolah sebagai instrumen penapis dini risiko pada alur *input* bukti transaksi, serta audit eksternal sebagai verifikator independen yang memeriksa keabsahan log digital secara terarah. Pendekatan ini menggeser paradigma audit pendidikan dari yang semula bersifat reaktif-periodik menjadi proaktif dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang dan celah kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik lemah pengawasan keuangan sekolah pada ekosistem ARKAS, serta merumuskan proposisi kerangka kerja audit kolaboratif guna memperkuat akuntabilitas pembiayaan pendidikan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen (*document analysis*). Pendekatan ini dipilih guna menyintesis proposisi teoretis dan kerangka konseptual mengenai sinergi audit dalam ekosistem digital berdasarkan kajian kritis terhadap literatur ilmiah dan dokumen resmi (Lailia, 2018). Analisis dokumen diposisikan sebagai metode utama untuk menelusuri pola anomali manajerial pada tata kelola keuangan pendidikan tanpa melakukan intervensi statistik terhadap data primer. Pendekatan kualitatif memungkinkan perumusan gagasan baru yang berakar dari sintesis temuan empiris sekunder secara mendalam dan komprehensif.

Sumber data penelitian dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Kategori pertama mencakup dokumen laporan resmi kelembagaan pengawasan, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas pengelolaan dana pendidikan tahun 2024–2026 di beberapa daerah (Kota Medan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Banten, dan Kabupaten Dompu), serta Laporan Survei



Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024 yang diterbitkan oleh KPK RI. Kategori kedua berupa artikel jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional yang diterbitkan dalam rentang tahun 2016–2026, yang berfokus pada topik digitalisasi pengelolaan dana BOS/BOSP, implementasi aplikasi ARKAS, sistem pengendalian internal, dan teori audit modern. Pembatasan rentang waktu 2016–2026 bertujuan untuk memastikan kemutakhiran data analisis seiring dengan dinamika implementasi regulasi pembiayaan pendidikan di Indonesia.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data akademik Google Scholar, Garuda, dan portal repositori resmi menggunakan kombinasi kata kunci "ARKAS", "akuntabilitas dana BOS", "audit internal pendidikan", dan "*continuous auditing*". Kriteria inklusi yang diterapkan dalam seleksi dokumen meliputi: (1) publikasi terbit dalam rentang tahun 2016–2026, (2) membahas aspek manajerial keuangan sekolah, akuntabilitas, atau fungsi audit, dan (3) memiliki argumen yang didukung data empiris atau rujukan teoretis yang terverifikasi. Dokumen yang berupa opini tanpa landasan metodologis dieksklusi dari korpus data penelitian. Dari proses penelusuran dan penyaringan tersebut, diperoleh dokumen relevan yang kemudian diklasifikasikan ke dalam matriks telaah tematik.

Teknik analisis data mengacu pada tahapan analisis isi (*content analysis*) kualitatif yang mencakup kondensasi data, kategorisasi tematik, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber data diterapkan untuk menjaga validitas analisis dengan mengonfrontasikan temuan faktual pada LHP BPK, laporan integritas KPK, serta teori tata kelola keuangan sektor publik. Sintesis konseptual kemudian dikembangkan untuk merancang model audit kolaboratif berbasis risiko digital yang disajikan pada bagian pembahasan. Seluruh tahapan analisis diarahkan untuk membangun proposisi teoretis yang koheren antara pola permasalahan empiris dan tawaran kerangka solusi manajerial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI periode 2024–2026 dan publikasi integritas KPK mengidentifikasi adanya kerentanan prosedural dalam tata kelola belanja BOSP pascadigitalisasi ARKAS. Data dokumentasi resmi memperlihatkan modus penyimpangan yang bervariasi, mulai dari ketidaksesuaian harga satuan, belanja fiktif, hingga manipulasi bukti digital. Seluruh data temuan pada dokumen resmi tersebut dipetakan untuk mengidentifikasi pola penyimpangan dan mekanisme pengungkapan perkaranya. Ringkasan pola temuan penyimpangan dana pendidikan pascadigitalisasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pola Temuan Penyimpangan Pengelolaan Dana BOSP Pascadigitalisasi ARKAS

Entitas / Daerah Pemeriksaan	Tahun Anggaran	Modus Penyimpangan	Operandi	Mekanisme Terungkapnya Temuan
Satuan Pendidikan di Kota Medan	2024	Mark-up harga barang melebihi Standar Satuan Harga pada 14 sekolah		Audit eksternal pascatransaksi (BPK RI)
SMKN 5 Bandar Lampung	2024	Realisasi belanja operasional tanpa pertanggungjawaban sah	bukti	Audit eksternal pascatransaksi (BPK RI)



Satuan Pendidikan di Kab. Dompu	2024-2025	Kelebihan bayar dan <i>mark-up</i> belanja modal pengadaan sarana	Audit eksternal pascatransaksi (BPK RI)
Satuan Pendidikan di Prov. Banten	2024	Manipulasi bukti unggahan dokumen transaksi pada sistem pengadaan	Audit eksternal pascatransaksi (BPK RI)
Agregat Sekolah Skala Nasional	2024	Pemotongan alokasi dana dan pelaporan realisasi kegiatan fiktif	Survei penilaian integritas (KPK RI)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1, tampak pola yang sangat seragam di mana seluruh penyimpangan belanja sekolah baru teridentifikasi melalui audit eksternal pascatransaksi (*post-factum*) oleh BPK RI atau survei integritas KPK RI. Tidak ditemukan catatan dalam dokumen yang dianalisis bahwa anomali transaksi tersebut berhasil dicegah atau diungkap terlebih dahulu oleh mekanisme pengawasan internal sekolah. Pola pada Tabel 1 ini mengindikasikan bahwa sistem ARKAS yang telah diterapkan secara administratif belum difungsikan secara optimal sebagai sistem pengendalian preventif (*control system*) di tingkat operasional. Fakta ini menegaskan adanya celah pengawasan internal di tingkat satuan pendidikan yang perlu dijembatani secara terstruktur.

Untuk memahami sejauh mana literatur ilmiah telah merespons permasalahan tersebut, dilakukan pemetaan tematik terhadap artikel jurnal terindeks periode 2016–2026. Penelusuran difokuskan pada karya ilmiah yang mengkaji ARKAS, sistem pengendalian intern, dan fungsi audit pendidikan. Setiap artikel dikelompokkan berdasarkan fokus pembahasan utamanya guna mengidentifikasi kecenderungan orientasi kajian terdahulu. Hasil pemetaan literatur ilmiah tersebut dipaparkan pada Tabel 2.

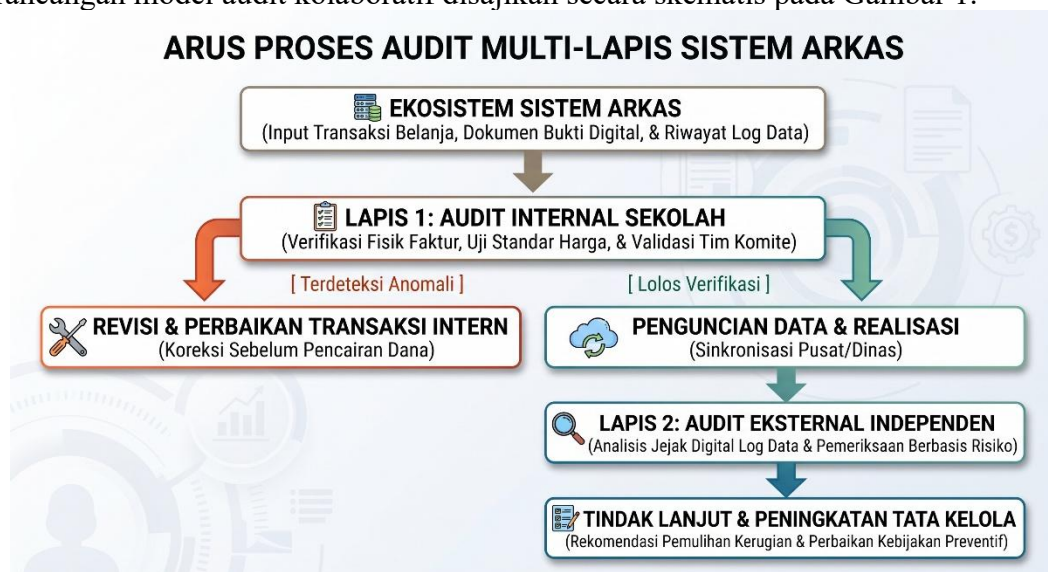
Tabel 2. Pemetaan Fokus Kajian Literatur Terkait ARKAS dan Audit Pendidikan (2016–2026)

Fokus Kajian Utama Literatur	Karakteristik Pembahasan	Contoh Rujukan	Sumber
Efektivitas Teknis dan Persepsi ARKAS	Mengukur kemudahan operasional, kecepatan pelaporan BOSP, dan kepuasan teknis pengguna	Aliyah et al. (2025)	
Pengendalian Internal Berbasis COSO	Menelaah fungsi pembatasan anggaran ARKAS dan kepatuhan administratif satuan pendidikan	Kolaboratif (2026)	Sains
Peran Audit terhadap Akuntabilitas Publik	Membahas audit independen secara makro pada sektor publik tanpa mengaitkannya dengan sistem ARKAS	Lailia (2018)	
Inovasi dan Pembiayaan Berbasis TI	Menyoroti transformasi digital pembiayaan pendidikan dan tantangan tata kelola manajerial	Mangkuwinata (2026); Mangkuwi et al. (2023)	
Sinergi Audit Internal-Eksternal Berbasis ARKAS	Mengintegrasikan fungsi audit internal dan eksternal ke dalam alur kerja digital sistem ARKAS	Belum ditemukan pembahasan eksplisit	

Sebagaimana terangkum pada Tabel 2, mayoritas literatur terdahulu memusatkan perhatian pada efektivitas administratif ARKAS, kajian konseptual COSO, serta inovasi teknologi pembiayaan secara umum. Sejauh literatur periode 2016–2026 yang ditelaah, belum

ditemukan kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan peran audit internal dan eksternal ke dalam satu kerangka kerja digital berbasis sistem ARKAS. Kekosongan literatur pada baris kelima Tabel 2 memperkuat adanya kesenjangan akademik yang mendesak untuk diisi melalui formulasi kerangka konseptual baru. Hasil pemetaan ini membuktikan relevansi pengembangan model audit kolaboratif yang memadukan fungsi deteksi dini internal dengan pemeriksaan

Bertolak dari sintesis konseptual atas *stakeholder theory*, *fraud triangle*, kerangka COSO, serta prinsip *continuous auditing*, penelitian ini merumuskan sebuah proposisi teoretis berupa *Digital Risk-Based Collaborative Audit Framework*. Kerangka ini memvisualisasikan alur keterhubungan terpadu antara pengoperasian aplikasi ARKAS, lapisan deteksi dini internal, penapisan anomali risiko, audit eksternal independen, dan umpan balik manajerial. Alur rancangan model audit kolaboratif disajikan secara skematis pada Gambar 1.



Gambar 1. Proposisi Kerangka Audit Kolaboratif Berbasis Risiko Digital (Digital Risk-Based Collaborative Audit Framework)

Bagan alir pada Gambar 1 mengilustrasikan mekanisme pengawasan terpadu yang memadukan fungsi dua lapis audit di dalam alur operasional sistem ARKAS. Lapis pertama berkedudukan di tingkat satuan pendidikan, di mana audit internal yang beranggotakan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah melakukan verifikasi substantif terhadap bukti fisik, keabsahan penyedia barang, dan kesesuaian standar harga daerah sebelum transaksi disahkan dalam sistem. Apabila ditemukan anomali atau ketidaklengkapan berkas, transaksi dikembalikan untuk diperbaiki secara internal, sehingga mempersempit faktor peluang terjadinya manipulasi belanja (Cressey, 1953; Sari & Kusuma, 2019). Lapis kedua dijalankan oleh auditor eksternal (Inspektorat Daerah atau BPK) yang memanfaatkan data log digital dan riwayat perubahan data pada sistem untuk melakukan penapisan risiko (*risk screening*) secara berkala (Eulerich et al., 2020; Zahirah et al., 2022). Dengan demikian, pemeriksaan fisik di lapangan dapat difokuskan pada sekolah-sekolah yang teridentifikasi memiliki anomali data tinggi.

Pembahasan

Paradoks Digitalisasi ARKAS: Sistem Pencatatan Versus Sistem Pengendalian

Kompilasi data pada Tabel 1 memperlihatkan sebuah paradoks digitalisasi tata kelola keuangan sekolah di era modern. Di satu sisi, ARKAS berhasil meningkatkan efisiensi pembukuan dan mempermudah konsolidasi laporan pertanggungjawaban dana BOSP ke tingkat



pusat (Aliyah et al., 2025). Di sisi lain, digitalisasi pencatatan tersebut terbukti belum mampu menghentikan praktik penyimpangan belanja sekolah, seperti *mark-up* harga dan bukti transaksi yang tidak valid (BPK RI, 2025a, 2025b). Kondisi ini mengonfirmasi argumentasi bahwa efektivitas sistem informasi tidak ditentukan semata-mata oleh kecanggihan perangkat lunak, melainkan oleh konsistensi tata kelola pengawasan yang menyertainya (Yanti, 2021). Dalam konteks ini, ARKAS cenderung baru beroperasi sebagai sistem pencatatan (*recording system*), belum bertransformasi secara utuh menjadi sistem pengendalian aktif (*control system*) yang mampu mendeteksi potensi kecurangan secara dini.

Dari sudut pandang teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), satuan pendidikan memiliki kewajiban moral dan administratif untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana publik kepada masyarakat, orang tua siswa, dan pemerintah (Alirafi & Aisyah, 2020). Laporan keuangan yang diunggah ke dalam sistem ARKAS semestinya menjadi instrumen komunikasi transparansi yang dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Namun demikian, temuan audit eksternal BPK menunjukkan bahwa data yang tersaji dalam sistem kerap kali belum melalui proses verifikasi keabsahan fisik yang memadai. Akibatnya, terjadi asimetri informasi antara pengelola dana sekolah dengan masyarakat selaku pemangku kepentingan utama. Kelemahan fungsi verifikasi ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan dana pendidikan nasional.

Interpretasi Konseptual Melalui *Fraud Triangle* dan Kerangka COSO

Untuk menginterpretasikan secara konseptual mengapa anomali transaksi tetap terjadi di tengah sistem digitalisasi, telaah dokumen ini merujuk pada teori *fraud triangle* yang digagas oleh Cressey (1953). Teori ini mengidentifikasi tiga elemen pemicu kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Dalam ranah empiris pengelolaan keuangan publik, faktor peluang yang lahir dari lemahnya pemantauan internal merupakan elemen yang paling dominan mendorong timbulnya kecurangan (Sari & Kusuma, 2019). Berdasarkan analisis atas data Tabel 1, modus operandi seperti manipulasi bukti unggahan dan pembelanjaan fiktif merefleksikan eksploitasi elemen peluang yang terbuka akibat tidak adanya mekanisme verifikasi substansial di tingkat sekolah. Digitalisasi berhasil memperketat pembukuan pada aspek administratif, namun peluang penyimpangan tetap terbuka selama proses verifikasi transaksi di lapangan berjalan secara formalitas semata (Anisa & Masyhuri, 2026; Mubarak et al., 2025; Nur & Hanif, 2024; Rusmiyati et al., 2025; Wardani et al., 2025).

Penjelasan teoretis ini selaras dengan analisis berbasis kerangka pengendalian internal *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) yang mencakup lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Kolaboratif Sains, 2026). Dari kelima komponen tersebut, data sekunder yang dianalisis mengindikasikan bahwa dimensi penilaian risiko (*risk assessment*) dan pemantauan (*monitoring*) di tingkat satuan pendidikan merupakan area yang paling rentan. Penilaian risiko pengadaan barang di sekolah kerap diabaikan, sehingga ketidaksesuaian barang belanjaan dengan standar harga daerah tidak tertapis sebelum dana dicairkan. Mengingat sistem pengendalian internal menuntut keterpaduan seluruh komponen secara simultan (Kolaboratif Sains, 2026), maka kelemahan pada fungsi pengawasan internal akan meruntuhkan efektivitas sistem secara keseluruhan meskipun infrastruktur aplikasinya telah dirancang dengan baik. Terlebih lagi, elemen rasionalisasi sering kali menjadi faktor penghambat yang paling sulit dideteksi karena pelaku cenderung membangun justifikasi moral atas tindakan penyimpangan tersebut sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan profesional atau keserakahan pribadi (Adiah et



al., 2026; Fitriastuti & Umami, 2021; Muliarta et al., 2023; Putri & Januarti, 2023; Wirakusuma & Setiawan, 2019; Zainuri et al., 2023).

Redefinisi Paradigma Audit: Menuju Pendekatan Berkelanjutan Berbasis Risiko

Kesenjangan pengawasan pada ekosistem digital menuntut reorientasi mendasar terhadap paradigma audit sektor pendidikan. Sebagaimana ditegaskan Lailia (2018), akuntabilitas keuangan publik mensyaratkan berfungsinya mekanisme audit yang efektif dan independen. Data empiris pada Tabel 1 membuktikan bahwa audit eksternal oleh BPK RI bekerja efektif dalam mengungkap kasus, namun audit pascatransaksi tersebut tidak mampu memulihkan kerugian negara secara seketika. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma audit menuju pendekatan audit berkelanjutan (*continuous auditing*) dan audit berbasis risiko (*risk-based audit planning*). Literatur audit modern membuktikan bahwa penerapan audit berbasis teknologi secara berkelanjutan mampu mendeteksi potensi anomali secara jauh lebih cepat dibandingkan pendekatan audit berkala konvensional (Eulerich et al., 2020; Zahirah et al., 2022).

Penguatan tata kelola pembiayaan pendidikan menuntut siklus terpadu yang menghubungkan identifikasi alokasi sumber daya, pendokumentasian, dan evaluasi berkala secara berkesinambungan (Mangkuwi et al., 2023; Mangkuwinata, 2026). Dalam konteks sistem ARKAS, kesinambungan fungsi audit internal dan eksternal semestinya tidak berjalan dalam koridor yang terpisah. Audit internal sekolah perlu diintegrasikan secara fungsional ke dalam sistem guna memeriksa kepatuhan material saat berkas diunggah. Pada saat yang bersamaan, auditor eksternal dapat memanfaatkan data riwayat digital (*digital audit trail*) untuk memprioritaskan pemeriksaan pada satuan pendidikan yang menunjukkan skor risiko transaksi tinggi. Keterpaduan langkah ini memastikan bahwa pengawasan keuangan berjalan secara simultan sepanjang tahun anggaran.

Perlu digarisbawahi bahwa kerangka kerja yang ditampilkan pada Gambar 1 ini diposisikan sebagai sebuah proposisi konseptual yang bersumber dari telaah kepustakaan dan dokumen sekunder, bukan luaran dari pengujian eksperimental langsung. Asumsi operasional mengenai penelusuran jejak log digital ARKAS secara mendekati waktu nyata (*near real-time*) menuntut adanya dukungan regulasi, keterbukaan hak akses data oleh kementerian terkait, serta kesiapan infrastruktur peladen (*server*) yang andal. Selain aspek teknis, kompetensi pengelola keuangan dan integritas tim pemeriksa internal di sekolah menjadi variabel penentu keberhasilan implementasi kerangka kerja ini di lapangan. Oleh sebab itu, efektivitas operasional dari kerangka audit kolaboratif ini masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut melalui penelitian lapangan terapan maupun program percontohan (*pilot project*) di berbagai daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan prosedural antara tujuan ideal digitalisasi keuangan sekolah melalui ARKAS dengan realitas berulangnya penyimpangan dana pendidikan di lapangan. Analisis dokumen mengonfirmasi kecenderungan bahwa penyimpangan belanja sekolah mayoritas baru teridentifikasi melalui audit eksternal pascatransaksi (*post-factum*) tanpa didahului penapisan dini oleh pengawasan internal sekolah. Temuan ini mengindikasikan bahwa ARKAS saat ini beroperasi optimal sebagai sistem pencatatan (*recording system*), namun belum terintegrasi secara utuh sebagai sistem pengendalian preventif (*control system*). Sebagai respons konseptual atas kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan proposisi *Digital Risk-Based Collaborative Audit Framework* yang

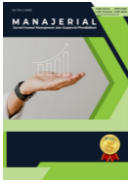


memosisikan audit internal sebagai penapis risiko saat *input* transaksi dan audit eksternal sebagai pemeriksa independen atas jejak digital sistem.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengayaan literatur akuntabilitas pendidikan dengan menggeser fokus audit dari aktivitas periodik yang terpisah menjadi mekanisme melekat yang berkesinambungan di era digital. Secara praktis, kerangka konseptual ini dapat dijadikan acuan awal bagi pengambil kebijakan di kementerian dan dinas pendidikan untuk mengembangkan fitur peringatan anomali belanja di dalam aplikasi ARKAS. Karena kerangka yang dirumuskan ini merupakan sintesis kepustakaan yang bersifat konseptual, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk menguji penerapannya secara empiris melalui studi kasus implementasi di sekolah atau evaluasi program percontohan. Pengujian empiris di masa depan diharapkan mampu memvalidasi keandalan teknis integrasi data log serta mengukur kesiapan sumber daya manusia sekolah dalam menjalankan pengawasan kolaboratif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiah, M., Mirza, T., & Jailani, J. (2026). Pengembangan kapasitas pegawai dalam meningkatkan profesionalisme kerja pada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(3), 1924–1932. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i3.11643>
- Alirafi, I., & Aisyah, M. N. (2020). Analisis akuntabilitas kinerja sekolah dari perspektif teori pemangku kepentingan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2321–2335. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Aliyah, N., Mus, S., & Irmawati, I. (2025). Efektivitas penggunaan aplikasi ARKAS dalam pelaporan dana BOS sekolah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 394–399. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.1892>
- Anisa, A., & Masyhuri, M. (2026). Implementasi *digital technologies* dalam sistem akuntansi UMKM: Penguatan efisiensi operasional dan akuntabilitas keuangan. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(4), 333–343. <https://doi.org/10.65310/zvcmqn76>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025a). *Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana BOS tahun 2024 di SMKN 5 Bandar Lampung*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025b). *Temuan dugaan penyimpangan dana BOS di sekolah negeri Provinsi Banten tahun anggaran 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025c). *Temuan dugaan penyimpangan dana BOS tahun anggaran 2024 di Kota Medan*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Temuan indikasi penyimpangan dana BOS tahun 2025 di Kabupaten Dompu*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Eulerich, M., Georgi, C., & Schmidt, A. (2020). Continuous auditing and risk-based audit planning: An empirical analysis. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 17(2), 141–155. <https://doi.org/10.2308/JETA-2020-004>



- Fitriastuti, A. R., & Umami, M. K. (2021). The effect of financial stability, industrial conditions and external pressures on fraudulent financial statements in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2020 period. *Islamic Accounting Journal*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.18326/iaj.v1i1.1-11>
- Jurnal Kolaboratif Sains. (2026). Pengendalian internal pengelolaan dana BOS berbasis ARKAS. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(4), 3391–3407. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i4.6120>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Survei penilaian integritas pendidikan 2024*. KPK RI.
- Lailia, N. (2018). Peran audit terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. *Dirasah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 154–168. <https://doi.org/10.31004/dirasah.v1i2.145>
- Mangkuwinata, S. M. I. (2026). Inovasi pembiayaan pendidikan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan (JERKIN)*, 4(4), 1120–1131. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6044>
- Mangkuwinata, S. M. I., Yulia, V., Walidaini, & Safitria, W. W. (2023). Analisis sumber dan jenis pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 11–22. <https://doi.org/10.31004/tarbiyatulilmu.v2i1.189>
- Mubarak, Y., Sulistiyarini, S., & Basri, M. (2025). Transformasi digital aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2704–2725. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4557>
- Muliarta, I. K., Jayantiari, I. G. A. M. R., Purwani, S. P. M. E., & Parsa, I. W. (2023). Analisis potensi *fraud* dalam pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pelayanan kesehatan di Indonesia: Tinjauan sistematis. *Intisari Sains Medis*, 14(2), 903–908. <https://doi.org/10.15562/ism.v14i2.1816>
- Nur, A. F., & Hanif, M. (2024). Digitalisasi untuk transparansi keuangan sekolah di MTs Ma'arif NU 1 Sumbang. *EDUTECH: Jurnal Inovasi Pendidikan Berbantuan Teknologi*, 4(2), 67–74. <https://doi.org/10.51878/edutech.v4i2.3061>
- Putri, N. S., & Januarti, I. (2023). Perspektif *fraud diamond* dalam mendeteksi kemungkinan kecurangan laporan keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(3), Article 619. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i03.p03>
- Rusmiyati, L., Abdullah, R., Zulaikha, S., & Takdir, M. (2025). Transformasi manajemen keuangan sekolah di era digital: Kajian literatur terhadap efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5372–5380. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1428>
- Sari, I. M., & Kusuma, H. (2019). *Fraud triangle theory*: Pendekatan strategis dalam mendeteksi korupsi dan kecurangan pada laporan keuangan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10001>
- Wardani, A. A., Octavia, C., Widiyanah, I., & Sholeh, M. (2025). Digitalisasi keuangan sekolah dasar di SDI Al Irsyad: Langkah menuju pengelolaan yang akuntabel dan modern. *Jurnal Madinasika: Manajemen Pendidikan dan Keguruan*, 7(1), 42–54. <https://doi.org/10.31949/madinasika.v7i1.14245>



- Wirakusuma, I. G. B., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh pengendalian internal, kompetensi dan *locus of control* pada kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1545–1572. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p26>
- Yanti, N. L. T. (2021). Penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di SMPN 3 Sukawati dalam program RKAS. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 139–151. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i1.1550>
- Zahirah, F. R., Melenia, F., & Aminy, A. R. (2022). *Continuous audit*: Penerapan dan pengendalian pelaksanaan fungsi audit berbasis teknologi informasi. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 18(2), 185–198. <https://doi.org/10.25170/balance.v18i2.3412>
- Zainuri, B. N. P., Akram, & Santoso, B. (2023). The influence of religiosity, job satisfaction and rationalization on fraud with gender as a moderation variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 144(12), 138–147. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-12.17>